Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2024. Vol. 5, No. 2. Page 224-235
https://doi.org/10.52103/jahr.v5i2.1725
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Menurut Perpres No 72 Tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Indonesia

Nur Azizah A Radjulaeni, *Masriadi, Reza Aril Ahri

Fakultas Kesehatan Masyarakat,, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History
Received: 02 Maret 2024
Revised: 04 April 2024
Accepted: 03 May 2024

Keywords: Impementasi; Penurunan Stunting; Perpres No. 72 Tahun 2021

Corresponding Author:
masriadi.masriadi@umi.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi percepatan penurunan stunting berdasarkan input proses output menurut Perpres No 72 tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi *(phenomenology)* yaitu jenis penelitian yang terperinsi penjelasan dan pemahaman individual berdasarkan pengalaman yang didapatkan khususnya mengenai implementasi Perpres 72 Tahun 2021 dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banggai Laut menggunakan teknik *Indepth Interview* (wawancara mendalam), dan melakukan observasi serta dokumentasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung dengan 8 informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, bahwa komponen input yaitu dilihat dari sumber daya manusia, pendanaan, dan sarana prasarana sudah berjalan dengan baik dengan adanya tim percepatan penurunan stunting yang dibentuk. Alokasi dana dalam percepatan penurunan stunting dikabupaten banggai laut pendanaannya dari APBN daerah melalui intevensi Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program penanggulangan stunting untuk alat pengukuran jumlahnya masih kurang, terutama alat antropometri. Sementara komponen proses yaitu dilihat dari sisi perencanaan program dan pelaksanaan program stunting, yang mana proses dalam percepatan penurunan stunting dikabupaten Banggai Laut telah berjalan dengan baik sesuai dengan Perpres no 72 tahun 2021. Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa program yang dijalankan dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan program yang telah dilakukan pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya yaitu berupa kegiatan 5 pilar. Dan komponen output bahwa prevalensi stunting dikabupaten banggai laut dari tahun ketahun mengalami penurunan dan sudah melewati target yang ditentukan sesuai perpres no 72 tahun 2021, Kabupaten Banggai Laut menjadi kabupaten dengan angka prevalensi stunting terendah diSulawesi Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting dengan baik berdasarkan Perpres no 72 tahun 2021 dan melaksanakan 5 pilar strategi percepatan penurunan stunting terbukti dengan prevalensi stunting dikabupaten Banggai Laut yang mengalami penurunan setiap tahunnya dan telah mencapai 14% sesuai dengan target dalam perpres no 72 tahun 2021.

LATAR BELAKANG

Salah satu isu prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah percepatan penurunan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi yang terjadi pada ibu dan balita, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting merupakan permasalahan yang serius karena memberikan dampak buruk bagi penderitanya, baik

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

dampak jangka pendek maupun jangka panjang, dampak jangka pendek, stunting mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan fisik dan metabolisme. Adapun dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan kemampuan kognitif, prestasi belajar, kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko mengidap penyakit tidak menular (TNP2K, 2017).

Kejadian stunting pada balita merupakan salah satu permasalahan gizi secara global. Angka prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, terdapat 24,4% balita di Indonesia masih menderita stunting. Menurut batasan WHO, angka stunting dikatakan sangat tinggi bila prevalensinya ≥30%, dan tinggi bila prevalensinya 20 sampai <30% (Wulan Cahya, 2022)

Di Indonesia, Pemerintah menetapkan kebijakan pencegahan stunting, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan fokus pada setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa Usaha penanggulangan Stunting juga dilakukan melalui Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 12 Tahun 2021 Tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Peraturan BKKBN, 2021).

Prevalensi anak stunting yang dikemukakan oleh WHO 2018, Indonesia termasuk ke dalam negara tertinggi ketiga di regional Asia Tenggara atau South-East Asia Regional (SEAR) dengan ratarata prevalensinya pada tahun 2005-2017 adalah 36,4%. Angka prevalensi yang didapatkan dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 tercatat angka prevalensi anak stunting di Indonesia sebesar 30,8%, dan jika disejajarkan dengan negara-negara di dunia maka Indonesia masuk dalam lima besar yang angka stuntingnya masih tinggi (Tedy Alfian,2022)

Berdasarkan hasil riset Kesehatan dasar (Riskesdas 2018) menunjukkan penurunan prevalensi balita di tingkat nasional sebesar 6,4 % selama periode 5 tahun, yaitu 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8 % pada tahun 2018. Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia menurun menjadi 14%. Target tersebut dapat tercapai dengan melibatkan peran multisektor dan memastikan adanya sinkronisasi program dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa. Kondisi ini menggambarkan tugas berat yang masih harus diselesaikan terkait penanggulangan stunting di Indonesia. Langkah yang ditempuh untuk mempercepat pencapaian target tersebut adalah dengan menentukan kabupaten/kota dan/atau desa tertentu sebagai fokus. Jumlah kabupaten/kota fokus ini akan diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh kabupaten/ kota di Indonesia (Bappenas, 2018).

Beberapa Negara secara dramatis berupaya mengurangi prevalensi stunting anak. Intervensi yang diberikan dari dalam dan luar sektor kesehatan yang disebut gizi spesifik dan strategi sensitif seperti perbaikan dalam pendidikan ibu, gizi ibu, perawatan ibu dan bayi baru lahir, dan pengurangan fertilitas/interval antar kehamilan. Strategi yang tepat mampu untuk menanggulangi angka stunting. Di Indonesia Titik persebaran stunting hampir terjadi di seluruh provinsi. Daerah dengan stunting tertinggi berada di kawasan tengah dan timur Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Hampir semua provinsi di pulau tersebut memiliki tingkat stunting diatas rata-rata nasional. Angka Sulawesi Tengah sendiri berada pada angka 32,3% (Kemenkes RI, 2018)

Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki prevalensi stunting lebih tinggi dibandingkan prevalensi stunting secara nasional. Berdasarkan data Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, SSGBI 2021, Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-8 dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 29,7%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi stunting Indonesia yaitu 27,67% (Kemenkes RI, 2020)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Salah satu kabupaten yang ada disulawesi tengah yaitu kabupaten Banggai Laut. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting telah berupaya dan berkomitmen untuk terus menurunkan angka anak stunting baik itu melalui intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Jika praktik baik dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banggai Laut ini terus dilakukan maka optimis target nasional sebesar kurang dari 14 persen dapat di capai.

Dari permasalahan stunting yang ada, pemerintah Indonesia berusaha untuk menanganinya dengan cara mengeluarkan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah kecepatan penderita stunting di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Maka dengan adanya aturan tersebut pemerintah setempat khususnya Kabupaten Banggai Laut harus memberikan perhatian lebih untuk menangani hal ini.

Maka dari itu, permasalahan mengenai stunting sebaiknya harus segera diatasi dengan serius dengan adanya peraturan ataupun strategi yang dalam hal ini merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sesuai dengan kebijakan, target sasaran dan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah untuk menangani permasalahan stunting.

Sehingga berdasarkan masalah tersebut peneliti mengangkat judul penelitian "Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Menurut Perpres No 72 tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan fenomenologi *(phenomenology)* yaitu jenis penelitian yang terperinsi penjelasan dan pemahaman individual berdasarkan pengalaman yang didapatkan khususnya mengenai implementasi Perpres no 72 Tahun 2021 dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banggai Laut menggunakan teknik *Indepth Interview* (wawancara mendalam), dan melakukan Observasi serta Dokumentasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Waktu penelitian telah dilaksanakan tanggal 04 Maret s/d 08 Maret 2024. Sementara lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banggai Laut.

Teknik penelitian di rencanakan dengan menggunakan Snowball Sampling. Dalam penelitian ini peneliti membagi tiga jenis informan yaitu: 1). Informan utama dalam penelitian ini adalah petugas kesehatan atau penanggung jawab bagian program *stunting* sebanyak 5 orang. 2). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Laut sebanyak 1 orang. 3). Informasn pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat sebanyak 2 orang. Instrumen dalam penelitian ini adalah selain peneliti sendiri, juga dilengkapi dengan, notebook, gambar hasil wawancara dengan informan, informed concent, pedoman wawancara dan pedoman observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui teknik wawancara berkaitan dengan indikator strategi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting yaitu strategi kabupaten banggai laut dalam Upaya menurunkan angka stunting dengan adanya komunikasi yang baik serta data eppgbm yang dapat mempermudah untuk memantau kasus stunting dan melakukan aksi konvergensi stunting yang turut dilakukan oleh para dinas dan Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yang terlibat pada penanganan stunting balita di Kabupaten Banggai Laut melalui komunikasi para pihak yang

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

terlibat. Komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan stunting berlangsung sejak terbentuknya Perpres No 72 Tahun 2021 (Dalam Percepatan Penurunan Stunting).

Hasil Penelitian menunjukan bahwa sasaran utama Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam upaya pencegahan stunting adalah Ibu hamil, calon pengantin, remaja, ibu menyusui dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tanggal dengan seribu hari pertama kelahiran (1.000 HPK). Ini karena kebutuhan akan kecukupan gizi bagi anak adalah sejak masa kehamilan. Sejak masa kehamilan tersebut, harus dipastikan kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi bagi ibu hamil dan anak dalam kandungannya. Pemantauan kesehatan dan kecukupan gizi ini harus terus dilakukan sampai anak minimal memasuki usia dua tahun, usia lima tahun bahkan sampai dengan menginjak usia remaja. Karena pada masa tersebut sedang terjadi masa pertumbuhan, dimana sangat memerlukan asupan gizi yang memadai. Hal ini sudah sesuai dengan Perpres no 72 tahun 2021 pada pasal 3.

Sebagai salah satu indikator kunci dari komitmen pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut dalam upaya percepatan pencegahan stunting, sejak tahun 2021 pemerintah Kabupaten Banggai Laut telah melakukan intervensi penganggaran percepatan penurunan stunting dalam struktur belanja pemerintah. Yang diintervensi melalui berbagai program prioritas yang berpotensi untuk mencegah terjadinya stunting pada anak.

Dampak stunting pada anak akan berpengaruh pada kulitas sumberdaya manusia (SDM) dimasa yang akan datang. Sebagai bangsa yang sedang berpacu untuk melakukan pembangunan nasional yang adil dan merata, tentu membutuhkan dukungan SDM yang handal. Kebutuhan SDM yang handal tersebut tentu akan sulit dipenuhi apabila banyak dari anak-anak penerus bangsa yang mengalami stunting.

Pemerintah berdasarkan Target Nasional telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui aksi nyata pelaksanaan program dan kegiatan yang konvergen dan terintegrasi. Untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banggai Laut telah menetapkan 10 Desa Lokus prioritas khusus percepatan penurunan stunting.

Selain itu komunikasi dalam upaya penanganan stunting balita merupakan faktor pendorong terjalinnya keterbukaan dalam informasi, berjalan dengan baik karena memiliki visi misi dan tujuan sama antar pemerintah. Adanya komunikasi untuk mendorong kebijakan baik dan jelas berkaitan dengan munculnya persoalan di lapangan dan melalui komunikasi yang baik dapat memperkuat proses penanganan stunting balita. Dan adanya komunikasi yang baik sangat membantu pihak untuk memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman dan memberikan rasa nyaman dan rasa aman untuk melakukan suatu kegiatan

Strategi merupakan suatu kegiatan perencanaan sistematis para pembuat kebijakan (pemimpin utama) yang berorientasi pada tujuan organisasi dengan jangkauan waktu yang panjang dimasa mendatang, dimana didalam perencanaan terebut berisikan langkah-langkah detail dan komprehensif bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan suatu strategi kebijakan sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, karena strategi yang telah disusun tersebut akan membantu para pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting juga terletak pada peran pemerintah dalam menegakkan peraturan guna untuk kemaslahatan umatnya. Kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia terkhusus di Kabupaten Banggai Laut untuk menanggulangi penderita stunting. Hal ini terjadi karena membuka ruang kepemimpinan suatu negara untuk mengendalikan situasi tertentu untuk kemaslahatan umatnya dari suatu peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara berkaitan dengan indikator faktor penghambat yang memengaruhi stunting dikabupaten Banggai Laut yaitu dari masyarakat sendiri yang tidak mengindahkan program yang dijalankan oleh pemerintah. Bukan hanya faktor kualitas masyarakat yang rendah dan perekonomian masyarakat yang masih bergantung dengan bantuan pemerintah.

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor hambatan ini dapat merusak faktor pendukung karena program yang dijalankan ditujukan langsung kepada masyarakat namun factor hambatan terdapat langsung dari masyarakatnya. Masyarakat tidak memiliki kesadaran sendiri untuk menjaga masa depan anak yang mungkin berpengaruh dalam perkembangan dan pendidikan sang anak.

Dalam mengimplementasikan program tersebut keterbatasan anggaran untuk tingkat kelurahan, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya membangun pola hidup sehat untuk mengurangi angka penderita stunting diKabupaten Banggai Laut, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan posyandu hal itu menyebabkan keterbatasan pihak kesehatan untuk mendata balita.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa faktor lain yang memengaruhi kejadian stunting balita yaitu pola makan sewaktu hamil, kepercayaan, pendapatan, dan kebersihan balita. Sesuai dengan uangkapan informan bahwa informan mengikuti kepercayaan dari orang tua dulu, dimana bayi sebelum usia 6 bulan sudah diberikan makan atau bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif. Menu makanan keluarga kurang beragam, terkadang balita cukup makan dengan kecap dengan nasi sudah cukup karena rendahnya pendapatan keluarga. Keluarga merasa bayi cepat diberi makanan pertumbuhannya cepat berkembang dan balita dengan tinggi badan pendek tidak menjadi suatu masalah asalkan mereka dapat beraktivitas dengan baik. Informan juga tidak rutin membawa balita mengikuti posyandu untuk memantau tinggi. Informan hanya membawa balita ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sakit

Salah satu faktor penghambat dalam penurunan stunting adalah komunikasi, Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi adalah langkah awal dalam implementasi kebijakan. Komunikasi adalah suatu kegiatan penyampaian informasi. Tujuan dari komunikasi adalah untuk penggerak mengerjakan sesuatu baik itu kegiatan bakti, sosialisasi dan sebagainya. Selanjutnya regulasi yang menjadi acuan dari indikator komunikasi adalah Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting pasal 16 disebutkan bahwa pengarah memberikan arahan terkait percepatan penurunan stunting. Dalam proses ini para pihak pihak yang terlibat dalam penanganan stunting membangun komunikasi secara langsung.

Faktor pengetahuan orang tua tentang pola asuh yang baik sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program penurunan angka stunting karena bagaimana pengasuhan mereka terhadap anaknya sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman mereka. Minimnya pengetahuan orang tua ini, salah satunya disebabkan jarangnya sosialisasi dari kader kepada ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Para kader juga ada yang belum mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita sehingga ini mengakibatkan para kader juga masih minim pengetahuannya tentang bina keluarga balita

Permasalahan stunting merupakan permasalahan serius, sehingga pemerintah menetapkan program percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Oleh karena itu, pemerintah mendorong upaya konvergensi yang melibatkan multisektor baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mempercepat penurunan stunting kepada sasaran prioritas daerah. Aksi konvergensi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan menurunkan stunting, dengan melibatkan koordinasi lintas sector

Aksi konvergensi dilakukan dengan melakukan dua intervensi yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

penyebab langsung terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Intervensi gizi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan

Efektifitas Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara berkaitan dengan Efektivitas implementasi Perpres no 72 tahun 2021 dapat dikatakan sangat efektif karena pemerintah banggai laut sendiri dalam program percepatan penurunan stunting mengacu pada perpres no 72 tahun 2021 dan hasil pencapaian setiap tahunnya yang mengalami penurunan angka prevalensi stunting.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan teknik wawancara, observasi sudah optimal dibuktikan adanya penurunan angka stunting. Tim percepatan penurunan stunting melaksanakan kegiatan dengan disiplin mulai dari analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, sistem manajmen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, sampai review kinerja tahunan serta tim percepepatan penurunan stunting bersedia menepati dan mematuhi peraturan dengan disiplin sesuai dengan arahan yang dilakukan sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 (Dalam Percepatan Penurunan Stunting).

Efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih tertuju pada pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input). Definisi tersebut sesuai dengan penjelasan Saxena, bahwa "efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas

Efektivitas mengacu "pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah cara pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Jika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (dalam pelaksanaan pembangunnan), efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih tertuju pada pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input). Definisi tersebut sesuai dengan penjelasan Saxena, bahwa "efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. (Santisabila, 2021).

Efektivitas dalam suatu program sangatlah penting selain efisiensi, karena keberhasilan suatu program itu berhasil atau tidak itu terlihat dari efektif atau tidaknya dalam mengatasi masalah itu. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepat penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. (Santisabila, 2021)

Jika dibandingkan dengan program aksi konvergensi yang disusun oleh pemerintah di Indonesia, ada banyak yang sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di negara lain. Aksi konvergensi juga melibatkan peran multisektor dan mendorong peran komunitas di level terkecil yaitu desa melalui pemberdayaan kader pembangunan masyarakat (KPM) yang ada dan telah dibentuk di desa. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam panduan pelaksanaan aksi konvergensi yang dikeluarkan oleh tim strategi nasional percepatan penurunan stunting

Input

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dilihat dari komponen input yaitu dari sumber daya manusia, pendanaan, dan sarana prasarana sudah berjalan dengan baik yang mana Ketersediaan sumber daya manusia di OPD yang menangani stunting sudah memadai dengan adanya tim percepatan penurunan stunting yang dibentuk.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Alokasi dana dalam percepatan penurunan stunting dikabupaten banggai laut pendanaannya dari APBN daerah. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program penanggulangan stunting terutama alat antropometri untuk alat pengukuran jumlahnya masih kurang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arumsari dkk di Puskesmas yang berada di Kabupaten Demak menyebutkan bahwa masih mengalami kekurangan petugas pelaksana program stunting (Arumsari et al., 2022). Selain itu, penelitian lain juga menyebutkan hal yang sama bahwa masih kekurangan petugas yang ahli di bidangnya khususnya tenaga gizi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya yang berperan penting dalam pelaksanaan program untuk mencapai suatu tujuan secara maksimal (Suzan, 2019). Pencegahan stunting merupakan multisektoral yang melibatkan semua aspek termasuk bidang kesehatan (Muthia et al., 2020). Dalam bidang kesehatan, pencegahan stunting harus melibatkan lintas program. Menurut Bappenas (2018) penyebab stunting salah satunya adalah terkait kesehatan lingkungan yang merupakan intervensi gizi spesifik.

Selanjutnya, input yang dilihat dari pendanaan, Pemerintah Kabupaten Banggai Laut telah memobilisasi berbagai sumberdaya dan sumberdana untuk mendukung pencapaian target tersebut, diantaranya melalui intevensi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arumsari dkk yaitu beberapa puskesmas menyebutkan mendapatkan dana dari Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan (Arumsari et al.,2022) Selain itu, penelitian yang dilakukan di puskesmas daerah Kabupaten Demak juga menambahkan bahwa mendapakan pendanaan dari dana desa(Arumsari et al., 2022).

Menurut (Subarsono, 2018) anggaran dalam pelaksanaan program merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian Sutinbuk et al (2022) menyebutkan bahwa pelaksana program kesehatan, jika terdapat kekurangan sumber daya salah satunya anggaran maka program tidak akan berjalan efektif. Penelitian lain menyebutkan bahwa ketersediaan sumber daya termasuk anggaran berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program (Subarsono, 2018)

Terakhir, dilihat dari sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ketersediaan antropometri masih kurang jumlahnya, ada Sebagian posyandu yang belum memiliki alat antropometri, hal ini sejalan dengan penelitian arumsari dkk yang mengatakan bahwa puskesmas SeKabupaten Merangin untuk puskesmas sudah mencukupi akan tetapi, untuk posyandu masih kekurangan baru tersedia sebanyak 195 set dari total posyandu 432 posyandu. Sedangkan untuk desa yang berhasil. Ketersediaan antropometri sudah mencukupi semua posyandu yaitu 36 antropometri. Sebaliknya untuk desa yang kurang berhasil mempunyai 6 alat antropometri dengan jumlah posyandu sebanyak 12 posyandu, berarti masih kurang 6 posyandu yang belum memiliki antropometri. Oleh karena itu, pemenuhan alat antropometri harus segera diadakan.

Hasil penelitian yang dilakukan Arumsari et al, (2022) di Puskesmas yang berada di Kabupaten Demak menyebutkan bahwa sebagian besar ketersediaan obat dan vitamin untuk penunjang program stunting mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan, yaitu vitamin A dan obat cacing. Hal ini sejalan dengan penelitian di puskesmas lain yang menyebutkan bahwa kebutuhan obat-obatan dan vitamin telah dipenuhi dengan baik. Ketersediaan sarana penunjang program sebagai intervensi spesifik untuk mendukung percepatan penurunan stunting sangat dibutuhkan seperti media KIE, alat pengolahan data, transportasi dan komunikasi. Media KIE merupakan media yang sering digunakan dalam kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan.

Berbagai masalah dihadapi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayahnya, hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penyediaan biaya operasional pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia masih

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

dianggap sebagai negara yang kurang mampu memberikan prioritas pelayanan kesehatan untuk penduduknya. Tanggung jawab pemerintah juga termasuk dalam penyesuaian sumber daya di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat sebagai seluruh upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif baik untuk sasaran bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, bapak, maupun yang sudah lanjut usia. Lokasinya menyeluruh dan berada mulai dari tingkat rumah tangga, tempat kerja dan tempat-tempat umum maupun tatanan sekolah. Pelayanan kesehatan masyarakat lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif dengan pendekatan kelompok masyarakat

Proses

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa komponen proses yaitu dilihat dari sisi perencanaan program dan pelaksanaan program stunting. Yang mana proses dalam percepatan penurunan stunting dikabupaten Banggai Laut telah berjalan dengan baik sesuai dengan Perpres no 72 tahun 2021. Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa program yang dijalankan dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan program yang telah dilakukan pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya yaitu berupa kegiatan 5 pilar. Namun, ada juga yang telah berubah mengikuti situasi kondisi yang ada. Dalam merencanakan program stunting ini, penanggung jawab yang berperan adalah tenaga gizi di masing-masing puskesmas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, masing-masing puskesmas telah melakukan sesuai dengan buku pedoman. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan dari pimpinan puskesmas sehingga buku pedoman dapat digunakan secara benar dan tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi saja (Muthia et al., 2019).

Proses perencanaan dalam konvergensi stunting yaitu dengan menentukan desa lokus stunting berdasarkan data sebaran stunting dan indicator cakupan layanan intervensi stunting. Namun ,ada kekurangan dalam koordinasi antar OPD dan Desa, karena tingkat pemahaman yang bervariasi dari setiap OPD dan desa dalam mengimplementasi pelaksanaan program 8 aksi konvergensi stunting baik di Kabupaten maupun di desa.

Perencanaan kegiatan merupakan langkah awal yang penting dalam menjalankan sebuah program. Menurut Taufiqurokhman (2018) perencanaan merupakan suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Kondisi ini terlihat bahwa perencanaan program layanan kesehatan, masih ada yang belum terintegrasi dengan intervensi gizi spesifik lainnya. Menurut Bappenas (2018) salah satu aksi integrasi intervensi penurunan stunting yaitu perencanaan yang harus dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan melibatkan lintas sektor.

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung berjalannya kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Banggai Laut. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kebijakan stunting sampai saat ini dirasa sudah maksimal (terlaksana) karena hampir setiap saat, Puskesmas dan kader kesehatan melaksanakan sosialisasi tentang penanggulangan stunting, Intervensi Program Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program gizi spesifik yang telah dilakukan adalah Program terkait intervensi dengan sasaran ibu hamil, Program yang menyasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan dan Program Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan.

Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah Desa; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu,

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan informasi bahwa semua kegiatan program pengembangan juga telah terlaksana dengan koordinasi seuluruh OPD terkait, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan. Bantuan social juga sudah banyak yang diberikan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat seperti bedah rumah, PKH, bantuan raskin, dan BLT dari pemerintah. Hanya saja masih kurang dari keterlibatan masyarakat dalam penurunan stunting. Rendahnya partisipasi masyarakat yang datang ke Posyandu khususnya adalah masyarakat yang memiliki balita akan melewati beberapa kegiatan posyandu seperti penimbangan, imunisasi lengkap serta pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh posyandu. Hal ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat, contohnya seperti perbedaan informasi yang didapat masyarakat yang mendapatkan informasi langsung dari posyandu dan yang tidak, balita tersebut tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan lain sebagainya. Rendahnya pengetahuan ibu secara tidak langsung sebagai penyebab kunjungan tidak rutin ke posyandu yang kemudian membuat terjadinya stunting pada baduta (Riyadh, 2023).

Output

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diperoleh informasi bahwa prevalensi stunting dikabupaten banggai laut dari tahun ketahun mengalami penurunan dan sudah mencapai target yang ditentukan di dalam perpres no 72 tahun 2021, sehingga dapat dikatakan implementasi percepatan penurunan stunting berdasarkan perpres no 72 tahun 2021 dikabupaten banggai laut sudah sangat baik pelaksanaannya.

Evaluasi output dilihat dari pencapaian yang telah dicapai oleh puskesmas dari program stunting yang dijalankan. Pencapaian ini dapat dilihat dari angka stunting yang telah menurun disetiap daerah puskesmas masing-masing. Evaluasi output dilihat dari sisi pencapaian yang telah dicapai oleh masing-masing puskesmas dalam menjalankan program stunting. Penelitian yang dilakukan Arumsari dkk di Puskesmas yang berada di Kabupaten Demak menyebutkan pelaksanaan program pemberian vitamain A dan tablet obat cacaing, pada balita melebihi 80% dan terlihat presentase jumlah balita yang mengalami stunting. Selain itu, pencapaian juga dapat dinilai dengan tingkat pengetahuan ibu yang telah meningkat mengenai pencegahan stunting sejak dini. Salah satu puskesmas menyebutkan bahwa Evaluasi setiap kegiatan program pencegahan stunting disampaikan kepada kepala puskesmas yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan, hambatan dan capaian kinerja program pencegahan stunting (Pradana et al., 2022)

Evaluasi output dilihat dari sisi pencapaian yang telah dicapai oleh masing-masing puskesmas dalam menjalankan program stunting. Penelitian yang dilakukan Arumsari dkk diPuskesmas yang berada di Kabupaten Demak menyebutkan pelaksanaan program pemberian vitamain A dan tablet obat cacaing, pada balita melebihi 80% dan terlihat presentase jumlah balita yang mengalami stunting di wilayah puskesmas masing-masing mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 (Arumsari et al 2022).

Pencapaian penurunan ini juga dialami di puskesmas lain, penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Sirampog menyebutkan prevalensi stunting telah mengalami penurunan (Khoeroh & Indriyanti, 2017). Selain itu, penelitian yang dilakukan di diBantarbolang Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa pencapaian dilihat tingkat pengetahuan ibu tentang bagaimana mencegah stunting dan bagaimana melakukan praktek pemberian ASI eksklusif juga masih sangat kurang (Priharwanti, 2022).

Pelaksanaan konvergensi stunting di kabupaten banggai laut dengan mengikuti juknis 8 (delapan) aksi konvergensi stunting tingkat Kabupaten/Kota dari Kemendagri, aksi 1 : analisis situasi, aksi2:perencanaan kegiatan, aksi 3 : rembuk stunting, aksi 4 : pembuatan regulasi (perbup) stunting di

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Kabupaten dan Desa. Tahapan kedua analisis sederhana terkait hasil pemetaan sosial Tahapan ketiga penyusunan rencana yang disampaikan saat rembuk stunting tingkat desa Tahapan keempat rembuk stunting Tahapan kelima Kader KPM mengawal melalui APBDes pelaksanaan dari usulan yang sudah direncanakan berdasarkan ansit Tahapan enam dan tujuh melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan konvergensi stunting tingkat desa yang dilakukan melalui sekretariat RDS.

Untuk mendapatkan output yang diharapkan, sumber daya manusia yang terlibat dalam upaya penanggulangan stunting harus lebih rajin untuk melakukan pendataan, pemantauan, dan pelaporan sehingga program dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh output yang maksimal perlu dilakukan pendataan yang jelas mengenai jumlah kasus stunting agar dapat menjangkau seluruh balita yang menderita stunting setiap bulannya.

Output merupakan penilaian dalam penentu pencapaian hasil dari terlaksananya program Evaluasi ini akan membandingkan antara hasil yang dicapai dari pengukuran dan target yang telah ditentukan oleh pemerintah baik nasional maupun daerah. Hasil studi pustaka didapat bahwa sebagaian besar capaian belum mencapai target yang telah ditentukan pemerintah. (Suryani, 2020)**.**

Output tidak akan pernah lepas dari penilaian dan evaluasi, penilaian atau evaluasi dalam implementasi sangat penting untuk dilakukan secara kontinyu. Pengertian output, dari segi bahasa adalah, hasil atau produk, jika kita tarik kedalam penegertian output pendidikan, berarti suatu hasil yang di keluarkan oleh lembaga pendidikan, hasil ini bisa berupa, suatu kebijakan, lulusan, dan pengeluaran. Lembaga pendidikan meningkatkan mutu dan kualitas peserta didik untuk menghasilkan suatu output yang mampu berdaya saing di dunia luar, lembaga pendidikan yang baik, selalu memperhatikan peserta didiknya dari semenjak masuk menjadi siswa pada sekolah itu sampai dengan lulus dari sekolah tersebut. (Zulkarnain, 2022)

KESIMPULAN

1). Strategi kabupaten banggai laut dalam Upaya menurunkan angka stunting yaitu dengan komunikasi yang baik ditunjang oleh data eppgbm yang dapat mempermudah untuk memantau kasus stunting serta melakukan aksi konvergensi stunting yang turut dilakukan oleh para dinas dan Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yang terlibat pada penanganan stunting di Kabupaten Banggai Laut. **2).** Faktor penghambat yang memengaruhi percepatan penurunan stunting dikabupaten Banggai Laut yaitu dari masyarakat sendiri yang tidak mengindahkan program yang dijalankan oleh pemerintah. Bukan hanya factor kualitas masyarakat yang rendah tetapi perekonomian masyarakat juga masih bergantung dengan bantuan pemerintah. **3).** Efektivitas implementasi Perpres no 72 tahun 2021 dikatakan sangat efektif karena pemerintah banggai laut sendiri dalam program percepatan penurunan stunting mengacu pada perpres no 72 tahun 2021 dan hasil pencapaian setiap tahunnya yang mengalami penurunan angka prevalensi stunting. **4).** Input meliputi sumber daya manusia dan pendanaan, yaitu sudah berjalan dengan baik yang mana Ketersediaan sumber daya manusia di OPD yang menangani stunting sudah memadai dengan adanya tim percepatan penurunan stunting yang dibentuk. Alokasi dana dalam percepatan penurunan stunting dikabupaten banggai laut pendanaannya dari APBN daerah. **5).** Proses meliputi perencanaan program dan pelaksanaan program stunting. Yang mana proses dalam percepatan penurunan stunting dikabupaten Banggai Laut telah berjalan dengan baik sesuai dengan Perpres no 72 tahun 2021. Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa program yang dijalankan dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan program yang telah dilakukan pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya yaitu berupa kegiatan 5 pilar**. 7).** Output meliputi pencapaian yang telah dicapai oleh Kabupaten Banggai Laut dalam Percepatan Penurunan Stunting dari program stunting yang dijalankan. Pencapaian ini sangat baik dapat dilihat dari angka prevalensi stunting yang telah menurun disetiap tahunnya dan telah mencapai target 14% sesuai perpres no 72 tahun 2021.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

SARAN

Diharapkan peran aktif pemerintah setempat dalam mengalokasikan sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung program-program percepatan penurunan stunting. Perlunya kesadaran dan lebih dekat lagi kepada masyarakat Agar masyarakat ada inisiatif dalam dirinya bahwa pengukuran anak balita sangat penting dilaksanakan. Upaya pencegahan stunting harus melibatkan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa A. (2023). Gambaran Karakteristik Orang Tua Anak Balita Stunting di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Pekkae. Jurnal Governansi 4(3) https://doi.org/10.30997/jgs.v5i2.1956.

Arumsari, W., Supriyati, D. and Sima, P.(2022). Evaluasi Pelaksanaan program Pencegahan stunting diera Pandemi covid-19. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, 10(2), pp. 82–94. Available at: https://doi.org/10.14710/jmki.10.2.202 2.82-94.

Ayuningtyas, D. (2018). Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers, 9(2), p. 196. Available at: https://doi.org/10.35790/eg.v9i2.34871.

Bappenas. (2018). Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota.

Erna K. (2021). Model Pengendalian Faktor Risiko Stunting pada Anak Usia di Bawah Tiga Tahun. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, e-journal, 9(2), p. 196. Available at: https://doi.org/10.35790/eg.v9i2.34871.

Fitrauni R, dkk. Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sigi. Journal of Muslim Community Health(JMCH),2022.Vol.3,No.4.Page193 209 https://doi.org/10.52103/jmch.v3i4.1237

Ginting,Jessica P. (2023). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak. Literature Review".6(1) Available at: https://doi.org/10.22376/ijlpr.2023.13.6.L349-357.

Gladys Apriluana. (2018). Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. Media Litbangkes Vol. 28 No. 4, Desember 2018. Available at: https://doi.org/10.4103/jiaomr.jiaomr_325_21.

Gurning, F. P. (2018). Dasar Administrasi & Kebijakan Kesehatan Masyarakat (M. Y. Pratama, ed.). Yogyakarta: K-Media, 3(1), p. 98. Available at: https://doi.org/10.20884/1.mhj.2023.3.1.8891.

Halim, A. Y. (2022). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Aksi Konvergensi. e-journal 28, pp. 114–124. Available at: https://doi.org/10.1159/000455379.

Hidayat, A. Alimul. (2018). Ilmu Kesehatan Anak. Jakarta: Salemba Medika.

Kemenkes RI (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, Kementrian Kesehatan RI, 53(9), pp. 1689–1699.

Kemenkes. (2021). Buku Saku: Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting

Khoeroh, H., Handayani, O.W. and Indriyanti, D.R. (2017) Evaluasi Penatalaksanaan Gizi Balita stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Sirampog, Unnes Journal of Public Health, 6(3), p. 189. Available at: https://doi.org/10.15294/ujph.v6i3.11723.

Khoirun Ni'mah. (2019). Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. Media Gizi Indonesia, Vol. 10, No. 1 Januari–Juni 2019 . Available at: https://doi.org/10.5005/jp/books/12580_11.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Maryunani A. (2018). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jakarta: Trans Info Media. doi: 10.32424/jeba.v21i4.1538

Mitra, (2019). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan). Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 6, Mei 2019. 2(1), pp. 34–41. https://doi.org/10.35892/nic.v2i1.270

Moehji, S. (2018). *Pengetahuan Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Papas Sinar Sinatri. 7(2), p. 633. doi: 10.37905/aksara.7.2.633-646.2021.

Muslihatun, MW. (2019). *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita.* Yogyakarta : Fitramaya. https://doi.org/10.33370/jmk.v15i1.190

Muthia, G., Edison, E. and Yantri, E.(2020) "Evaluasi Pelaksanaan program Pencegahan stunting Ditinjau Dari Intervensi gizi spesifik gerakan 1000 hpk di Puskesmas Pegang baru Kabupaten Pasaman," Jurnal Kesehatan Andalas, 8(4). Available at: https://doi.org/10.25077/jka.v8i4.1125

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.2014 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.Hal-3

Peraturan Presiden no 72 tahun 2021*Tentang Percepatan Penurunan Stunting.*

Pradana PH, F.K., Sriatmi, A. and Kartini, A. (2021) "Evaluasi Proses dalam Program Penanganan Stunting diSemarang," Higeia Journal of Public Health Research and Development, 5(4), pp. 587–595. Available at:https://doi.org/https://doi.org/10.15294/higeia.v5i4.52122.

Pradana PH, F.K., Sriatmi, A. and Kartini,A. (2022) The CIPP model of stunting management program during covid-19 pandemic in Semarang City, Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition), 10(2), pp. 150–160. Available at:https://doi.org/10.14710/jgi.10.2.150-160.

Priharwanti, A. (2022). Evaluasi CIPP (Context-Input-Process-Product) Program ASI Eksklusif sebagai Upaya Penurunan Stunting di Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Jurnal PENA, 36(2), pp. 89–97.

Rahmatika, (2022)."*Cuci Tangan Pakai Sabun Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan"*

Sri Mugianti. (2018). Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-60 bulan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Jurnal Ners Dan Kebidanan. E-ISSN : 2548-3811. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-85993-0_3.

Sugiyanto. (2020). *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Stunting Pada Balita Usia 25-60 Bulan. Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal) 7 (2) 2020: 9-20*

Suhardjo. (2019). *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Jakarta: Bumi Aksara

Tanuwidjaya, S. (2018). *Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja*, Jakarta : Agung Seto

TNP2K RI (2018) Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan stunting

Uliyanti. (2019). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan. Jurnal Vokasi Kesehatan. ISSN 2442-5478*

Wulandari,Nur A.dkk. (2022)."Determinant Kejadian Stunting Pada Balita Berdasarkan Segitiga Epidemiologi" 3(1): 123-140. Available at: https://doi.org/10.35790/eg.v9i2.34871.

Yulia Wardita. (2021). *Determinan Kejadian Stunting pada Balita. Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan) Vol. VI No. I Tahun 2021*

Yuwanti. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi Stunting Pada Balita di Kabupaten Grobogan. P-ISSN 2252-8865 E-ISSN 2598 – 4217 Vol. 10, No.1 Maret 2021*

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license